PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DALAM RESOLUSI KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA STUDI KASUS MASYARAKAT MULTIKULTUR DI LOMBOK

Oleh:

I Gusti Ayu Aditi

Program Studi Hukum Adat Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Email: lgustiayu334@gmail.com

Abstract

This research gap shows the importance of further exploration of how local wisdom can be an effective solution in preventing conflict due to social segregation and religious differences in Lombok. This research is empirical legal research that uses main data in the form of primary data or data obtained directly from the community based on the results of interview observations and documentation, in this case the subjects used as informants are community leaders and religious leaders who hold positions in the Forum for Religious Harmony (FKUB). Conflict resolution will be more appropriate if we use resolution models that are adapted to regional conditions and local culture where the conflict problem occurs. The ideal solution is if it is carried out on the full initiative of the lower community who still adhere to local customs and are aware of the importance of local culture in maintaining and ensuring the integrity of society. In relation to conflict resolution in the Lombok NTB community, it is known that there are basic principles of conflict resolution because the Lombok community does not want a win-lose decision in resolving a conflict, but must lead to peace which is resolved by deliberation and consensus. In an effort to resolve the conflict, both parties can protect each other's feelings. As a recommendation, in order to strengthen the SKB of the three Ministers, it needs to be implemented in the form of a Regional Regulation for the implementation of activities involving people of different religions, such as, among others, the Pujawali event at Pure Lingsar during the Sixth Sasih, Sima krame can be carried out in the form of mutual cooperation activities in order to clean the environment of the local area of residence.

Keywords ; *Local wisdom, conflict resolution, multicultural society, Lombok*

Abstrak

Gap penelitian ini menunjukkan pentingnya eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah konflik akibat segregasi sosial dan perbedaan agama di Lombok. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mempergunakan data utama berupa data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat berdasarkan hasil observasi wawancara dan dokumentasi, dalam hal ini sebagai subyek yang dijadikan informan yakni tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menduduki jabatan di Forum kerukunan umat beragama (FKUB). Penyelesaian konflik akan lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat dimana permasalahan konflik itu terjadi. Penyelesaian yang ideal adalah jika dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Sehubungan dengan penyelesaian konflik pada masyarakat Lombok NTB dikenal adanya prinsip-prinsip pokok penyelesaian konflik sebab dalam masyarakat Lombok tidak mengkehendaki putusan kalah menang dalam menyelesaikan suatu konflik, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dalam upaya penyelesaian konflik itu, kedua belah pihak bisa

saling menjaga perasaan masing-masing. Sebagai rekomendasi Untuk dapat menguatkan SKB tiga Mentri tersebut perlu di imlementasikan dalam bentuk Perda untuk pelaksanaan kegiatan yang melibatkan umat beragama yang berbeda, seperti antara lain , acara Pujawali di Pure Lingsar pada saat sasih Keenam , Sima krame dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan gotong royong dalam rangka membersihkan lingkungan wilayah tempat tinggal setempat.

Kata kunci ; Kearifan lokal, resolusi konflik, masyarakat multikultur,Lombok

Pendahuluan

Sejak tahun 2000 masyarakat Lombok NTB mengalami keterlambatan dalam berbagai sektor akibat dampak pandemi covid19 dan bencana alam. Khususnya Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak negatif yang meluas di berbagai sektor secara global. Berbagai penelitian telah menyoroiti konsekuensi parah pada industri pertanian, manufaktur, pendidikan, pariwisata, dan penerbangan (Kumar, 2021; Hasan et al., 2021). Pandemi COVID-19 secara signifikan berdampak pada berbagai sektor di Lombok, Indonesia. Seperti Pertumbuhan ekonomi di wilayah Lombok Timur menurun sebesar -3,10% karena pembatasan aktivitas masyarakat (Atmayanti, 2022). Demikian pula yang terjadi pada Sektor pariwisata mengalami penurunan tajam dalam kunjungan wisatawan asing dan domestik, dengan tingkat hunian hotel yang menurun hingga sekitar 20% dan 15.000 kehilangan pekerjaan (Yani et al., 2022). Kegiatan budaya seperti Nyongkolan, Begibung, dan Maulidan untuk sementara waktu bergeser untuk mengikuti pedoman pemerintah dalam rangka mitigasi penyebaran virus ((Muhlisin & Sudewi, 2023)Muhlisin & Sudewi, 2023). Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah menerapkan strategi termasuk promosi pariwisata, program jaring pengaman sosial, dan upaya vaksinasi (Yani et al., 2022).

Pulau Lombok yang kini menjadi tuan rumah sejumlah ajang internasional menghadapi tantangan sosial yang dapat memicu konflik antara etnis suku sasak yang mayoritas beragama Islam dan etnis Bali yang beragama Hindu. Kedua kelompok ini memiliki sejarah panjang interaksi, namun segregasi sosial yang terjadi menciptakan jarak yang rawan konflik. Untuk menjaga suasana kondusif dan menghindari konflik laten, diperlukan pendekatan berbasis kearifan lokal yang menekankan kerukunan dan kebersamaan diantara kelompok yang beragam (Mulyadi,2011;Mukti Ali ,1977). Penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kearifan lokal memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia. Kearifan lokal atau "the living law" mencerminkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di

masyarakat, termasuk hukum adat yang tidak tertulis namun diakui sebagai pedoman sosial (Quaritch Wales, 1948-1949).

Dengan maraknya isu konflik yang terjadi di pulau Lombok NTB ada beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Masyarakat multikultural Lombok, yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan agama, memiliki potensi kohesi sosial dan konflik. Sumber utama ketegangan antara masyarakat Muslim Sasak dan Hindu Bali meliputi perbedaan budaya, faktor ekonomi, sektarianisme, dan rendahnya pendidikan multikultural (M. Zaki, 2020). Konflik serupa muncul antara Muslim pribumi dan kelompok Salafi, dengan berbagai tingkat perlawanan di daerah pedesaan dan perkotaan (M. I. Fitriani, 2016). Nilai kearifan lokal, mengembangkan kompetensi multikultural di kalangan elit agama disarankan sebagai pendekatan alternatif untuk manajemen konflik dalam masyarakat majemuk (M. I. Fitriani, 2016). Strategi-strategi ini bertujuan untuk mendorong pemahaman dan koeksistensi damai di antara masyarakat Lombok yang beragam.

Gap penelitian ini menunjukkan pentingnya eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah konflik akibat segregasi sosial dan perbedaan agama di Lombok. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kearifan lokal dalam memelihara kerukunan antar kelompok etnis dan agama di Lombok, terutama antara etnis Sasak dan Bali. Analisis akan difokuskan pada bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat digunakan untuk menciptakan keharmonisan dan mengatasi tantangan multikulturalisme, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pelestarian kerukunan di masyarakat Lombok yang beragam.

Terkait hal tersebut untuk menjaga keadaan yang tetap kondusif dan keamanan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat umumnya dan pulau Lombok khususnya, dirasakan amat sangat perlu untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga perlukan pengelolaan konflik kemasyarakatan dan pemicu disharmonisasi masyarakat yang pernah terjadi ditahun 2000 silam tidak akan terulang kembali akibat tindakan radikalisme.

Kerukunan merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia, yang mengusung ideologi Pancasila, konstitusi UUD 1945 NKRI dan Bhineka Tunggal Ika merupakan empat pilar sebagai perekat bangsa yang ada di Indonesia dan tidak akan bisa digantikan dengan ideologi apapun. Keempat nilai tersebut merupakan kristalisasi

nilai-nilai yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai tersebut dipegang teguh dan konsekuen oleh masing-masing warga masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut mengingat masyarakat pulau Lombok NTB yang warganya masih bersifat pluralisme terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda, antara lain, suku, etnis agama adat istiadat dan kedaerahan yang senantiasa berpeluang berhadapan dengan konflik. Masyarakat Lombok yang mayoritas penduduknya suku Sasak dan beragama Islam dan suku Bali yang beragama Hindu merupakan penduduk minoritas dipulau Lombok ini, nampak sekilas terlihat harmonis.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mempergunakan data utama berupa data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat berdasarkan hasil observasi wawancara dan dokumentasi, dalam hal ini sebagai subyek yang dijadikan informan yakni tokoh masyarakat dan tokoh agama yang menduduki jabatan di Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sedangkan untuk mengkajinya menggunakan pendekatan Sosiologis, konseptual dan historis guna melihat bagaimana penerapan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Lombok NTB menjadi resolusi dalam penanganan konflik. Adapun Teori yang digunakan dalam menanalisis penelitian ini yaitu teori system hukum untuk melihat budaya hukum masyarakat Lombok NTB seberapa ketaatan terhadap Nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang dituangkan dalam bentuk asas-asas Hukum selanjutnya diwujudkan dalam bentuk norma-norma Hukum yang disepakati.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut merupakan data hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing perwakilan dari kantor wilayah kementerian Agama dan tokoh dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Gambaran umum tentang pelaksanaan kearifan lokal di Lombok khususnya pada masyarakat Hindu/Islam/Kristen/Budha. Menurut kirtha kabid bimas budha Drs. Egenius Siba, MM NTB pelaksana Bimas Katolik, Antonius Lepas M, I Gde Subrata Kabid Bimas Hindu Prop NTB dan Prof. H. Saiful Muslim, MM selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menyatakan, Masyarakat umat beragama di Lombok Provinsi NTB masih memegang teguh pada kepercayaan

pada leluhur dan masih menjalankan tradisi adat dan budaya yang dilakukan oleh para leluhur dan dilestarikan secara turun temurun hingga sampai saat ini.

Secara umum nilai kearifan lokal di Lombok khususnya sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di Lombok, baik yang beragama Islam, Hindu, Kristen dan Budha masing-masing kualitas dari agama-agama dapat diperkuat dengan menjunjung tinggi tentang kearifan lokal yang ada di Lombok. Masyarakat Budha di Lombok masih memegang nilai-nilai kearifan lokal hingga sampai saat ini. Salah satu contohnya adalah adanya upacara "memuja"/pujawali yang dilakukan selama 1 tahun dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan April-Mei disebut "*muja taor*" dan Juli-Agustus disebut "*muja baliit*" akan tetapi sebelum pada acara puncak masyarakat melakukan tradisi meroal di rumah masing-masing di akhiri dengan sambek/memberi tanda pada dahi dan dibawah telinga. Adapun Nilai-nilai kearifan lokal di Lombok yang dapat diangkat untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama seperti ada beberapa istilah yang familiar dalam kalangan masyarakat Lombok Provinsi NTB antara lain ; gudem/rembuk atau sangkep berupa kegiatan bersama atau musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat akibat ada perselisihan antara umat.

Selanjutnya disampaikan pula sejarah munculnya nilai-nilai kearifan lokal di Lombok Provinsi NTB. Munculnya nilai-nilai kearifan lokal di Lombok itu bermula dari rendahnya pengetahuan/keterbatasan pengetahuan masyarakat langsung untuk menyederhanakan cara pandang dan berpikir masyarakat yaitu dengan melakukan puja, memberikan persembahan kepada para leluhur di hadapan agar mendapatkan rejeki, perlindungan, menjauhkannya dari segala macam penyakit marabahaya. Munculnya kearifan lokal di Lombok tentu dari tradisi atau kebiasaan nenek moyang/leluhur yang hidup berdampingan antar komunitas sejak dulu. Sehingga budaya silaturahmi dan saling menyapa atau membantu dalam segala hal tumbuh dalam berbagai bentuk kegiatan ataupun narasi.

Kemudian dilanjutkan dengan Tokoh Agama yang juga memberikan pendapatnya terkait pertanyaan diatas. Bapak Prof. H. Saiful Muslim, MM selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menyatakan: Secara khusus diperlukan literatur untuk menjawab ini, tetapi pada masyarakat/umat beragama di Lombok mulai mengenal asnawa yang dibawa oleh para dai/tua juru/ustad yang datang ke Lombok dengan cara yang bijak, tidak dapat kekerasan. Sebagian besar diterima oleh masyarakat.

Pengangkatan nilai-nilai kearifan lokal dilakukan melalui kegiatan pujawali yang dilaksanakan setiap tahun dipura Lingsar pada saat acara teersama tersebut diikuti oleh umat Hindu Bali dan umat Islam suku Sasak yang tujuannya memohon keselamatan bersama. Sebelum acara puja wali dilaksanakan diawali dengan gotong royong bersama.

Karakteristik Konflik Yang Terjadi di Lombok Prop NTB faktor penyebab dan pemicu konflik yang terjadi di Lombok Prop NTB lebih besar disebabkan oleh fanatisme yang berlebihan dari masing-masing umat beragama. Fanatisme tersebut diiringi dengan sikap emosi, sehingga tidak sempat lagi berpikir jernih dalam melakukan tindakan yang bisa menimbulkan konflik. Selain itu disadari bahwa sifat masyarakat yang fanatis dan mudah emosi ini dimanfaatkan oleh para provokator untuk memperkuat suasana lewat berbagai isu yang mereka tebarkan ditengah masyarakat. Sifat konflik yang sering terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat masih tergolong dalam konflik rasial, konflik antar kampung dan konflik agama. Hal ini dapat dilihat dari beberapa konflik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Kebanyakan konflik terjadi dikarenakan kesalah pahaman antar kelompok baik berupa ketersinggungan satu sama lain yang mengakibatkan terlibatnya beberapa kelompok. Konflik rasial merupakan konflik yang terjadi antara ras yang berbeda. Konflik rasional akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok sendiri.

Konflik antar kampung merupakan bentrokan antar dua lingkungan bertetangga dengan motif hanya masalah sepele, penganiayaan pada salah satu warga kampung hingga memicu penyerangan balik dengan membawa senjata api rakitan, tombak, pedang, parang, dan bambu runcing. Seperti yang baru-baru ini terjadi antara karang taliwang dan monjok diakibatkan karena kesalahpahaman berujung emosi dan mengakibatkan banyak korban luka dan kerugian bagi warga yang tidak tahu menahu tentang permasalahan yang terjadi.

Selain konflik rasial dan konflik antar kampung, konflik agama juga sering terjadi beberapa tahun belakangan ini di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Konflik agama merupakan sebuah konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Konflik antar pemeluk agama berbeda merupakan patologi sosial yang disebabkan oleh hal-hal seperti kegagalan sosial, pembangunan, politik, ekonomi dan lain-lain. Kemudian, agama dijadikan sebagai alat

legitimasi sehingga ketika agama dikatakan sebagai sumber konflik dalam masyarakat, orang menganggap bahwa ajaran teologi yang berbeda disalahkn dan dikatakan sebagai sumber utama konflik dan perpecahan.

Seharusnya perbedaan yang ada bias menjadi Indasan toleransi antar umat beragama dan dapat mencirikan semboyan Negara Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika walaupun berbeda kita tetaplah satu. Sehingga perbedaan agama bukanlah menjadi alasan perpecahan dan permusuhan antar umat beragama di Indonesia malah agama seharusnya menjadi pemersatu perbedaan yang ada di Indonesia karena agama merupakan salah satu jalan kita menuju kerukunan dengan umat agama lain dengan cara saling toleransi dan harmonisasi antar agama bias terbangun. Konflik agama ini bukanlah hal yang tabu terjadi di Indonesia, karena memang konflik antar agama menjadi salah satu konflik yang paling sering terjadi. Agama bukan merupakan pemicu utama, tetapi lebih berperan sebagai factor penggiring yang datang belakangan, dimanfaatkan sebagai penggalang solidaritas. Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi salah satu pemicu konflik agama bisa terjadi.

Jika dilihat secara obyektif kondisi kerukunan di tengah masyarakat Nusa Tenggara Barat tergolong baik. Hubungan antara umat beragama bisa terjalin baik dan dikalangan tokoh agama juga bisa melakukan dialog. Umat islam sebagai mayoritas di daerah ini bisa memelihara kerukunan dengan menghargai umat lain yang minoritas dan begitu pula sebaliknya. Dalam berbagai kegiatan social, mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi hubungan umat beragama bisa terpelihara dengan baik. Ditingkat desa misalnya, walaupun ada penduduk yang berbeda agama, namun mereka bisa melakukan gotong-royong dalam membangun desa mereka. Keberhasilan dalam membangun kerukunan di daerah ini disebabkan dengan adanya kemauan saling menghargai antara penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain. Didalam terciptanya kerukunan umat beragama inilah pemahaman yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menciptakan perilaku saling menghargai serta menghormati antar agama, suku, budaya dan ras makanya penting dilaksanakan tentang pemahan moderasi beragama.

Adapun bentuk kearifan lokal yang digunakan dalam menangkal disharmonisasi antar umat beragama di Lombok selama ini seperti, Penyelesaian Konflik dengan Nilai-Nilai Kearifan Lokal, Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks atau latar dimana konflik itu terjadi. Dengan demikian, pendekatan yang umum sebenarnya

tidak relevan ditetapkan dalam menangani masalah konflik lokal sehingga dibutuhkan model khusus. Pendekatan dalam penyelesaian konflik yang belum banyak dikaji tetapi sebenarnya telah lama berjalan adalah kearifan lokal (*local wisdom*).

Adapun pola penyelesaian konflik memang terkadang unik, sehingga model di suatu daerah tidak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis banyak hal, tidak saja faktor global universal, tetapi perlu juga faktor lokal dan khusus. Penyelesaian konflik akan lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat dimana permasalahan konflik itu terjadi. Penyelesaian yang ideal adalah jika dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Sehubungan dengan penyelesaian konflik pada masyarakat Lombok NTB dikenal adanya prinsip-prinsip pokok penyelesaian konflik sebab dalam masyarakat Lombok tidak mengkehendaki putusan kalah menang dalam menyelesaikan suatu konflik, akan tetapi harus mengarah kepada perdamaian yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Dalam upaya penyelesaian konflik itu, kedua belah pihak bisa saling menjaga perasaan masing-masing.

Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada dan berlaku di masyarakat berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal itu disebabkan kearifan lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, lingkungan, dan Tuhan. Pendekatan kearifan lokal sangat tepat dalam menyelesaikan konflik karena selama ini di samping sudah membudaya dalam masyarakat, kearifan lokal juga masih memiliki nilai sakral dan tidak hanya berorientasi profan semata. Dengan adat lokasi ini, diharapkan revolusi konflik bisa selesai dan diterima secara damai oleh semua kelompok dalam waktu lama.

Selain argument diatas, beberapa alasan lain pentingnya kearifan lokal dalam penyelesaian kearifan lokal dalam penyelesaian konflik adalah dikarenakan kearifan lokal umumnya lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, dan sikap ketauladanan, bukan pada nilai-nilai individual. penyelesaian dengan resolusi konflik secara damai tidak meninggalkan rasa dendam dan sakit hati berkepanjangan, tetapi membangun emosi persaudaraan, rasa, nurani dan kehormatan diri. Oleh karena diselesaikan secara rasional, melibatkan emosi dan perasaan, penyelesaian bersifat tuntas

dan dapat diterima semua pihak yang bertikai. Di sinilah resolusi konflik menawarkan kebersamaan atau sama-sama menguntungkan (*win-win solution*) bagi yang bersengketa dan tidak merugikan satu pihak, sementara pihak lain diuntungkan (*win lose solution*). Sedangkan Forum Kerukunan Umat Beragama adalah lembaga yang dibentuk oleh tokoh-tokoh agama dari semua agama yang ada di Nusa Tenggara Barat. Lewat forum ini para tokoh agama bisa membangun komunikasi yang lebih baik untuk mencegah jangan sampai terjadi konflik di tengah masyarakat. Forum ini secara rutin setiap enam bulan sekali mengadakan dialog antar tokoh umat beragama. Dialog itu dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi kerukunan di daerah Nusa Tenggara Barat.

Selain dengan adanya instansi serta lembaga tersebut umat beragama di daerah Nusa Tenggara Barat juga bisa menjalin kerjasama social yang baik ditengah masyarakat. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan berbagai kegiatan social. Setiap kali ada gotong-royong di masyarakat, baik di tingkat desa hingga provinsi, mereka bisa bekerjasama dengan baik. Dalam kegiatan social ini tidak terlihat sama sekali adanya perbedaan agama antara mereka. Sebab mereka berpendapat hasil dari kerjasama social tersebut akan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Dasar atau Prinsip Kerukunan Umat Beragama di Indonesia bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para *founding fathers* Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya". Bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Selain itu, dalam pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”, oleh sebab itu dalam ayat (2) pasal 281 juga ditegaskan bahwa, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat dekriminatif”.

Jika dilihat dari Peraturan Perundang-undangan diatas, tentu dapat diketahui bahwa dasar hukum dan untuk menciptakan kehidupan rukun antar umat beragama telah diatur sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya agar terhindar dari pertikaian yang dapat memecah belah kerukunan antar umat beragama. Agama merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia, oleh karena itu kebebasan umat beragama harus dihargai dan dijamin. Dalam hal ini, negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara menganut agama sesuai pilihannya masing-masing dan menjalankan ibadat sesuai kepercayaannya. Hal ini secara jelas dan tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Adapun model regulasi kerukunan antar umat beragama yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat di Lombok Umat beragama di Nusa Tenggara Barat bisa menjalin kerjasama sosial yang baik ditengah masyarakat. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Setiap kali ada gotong-royong di masyarakat, baik di tingkat desa, kabupaten maupun provinsi, mereka mampu bekerja sama dengan baik tanpa mengurangi rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Didalam kegiatan sosial ini tidak terlihat sama sekali adanya perbedaan agama diantara mereka. Sebab mereka berpendapat hasil dari kerjasama sosial tersebut akan dinikmati bersama oleh semua lapisan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan seperti pertemuan lintas agama yang dilakukan oleh pemerintah Kemenag NTB menjadi salah satu contoh untuk mengamalkan nilai-nilai toleransi antar umat agama dan sekaligus untuk mensosialisasikan masyarakat kepada perdamaian antar umat beragama agar tidak ada timbulnya konflik agama di dalam kehidupan bermasyarakat warga Indonesia terutama warga NTB. Dengan banyaknya

kegiatan lintas agama seharusnya masyarakat menjadi lebih sadar akan adanya toleransi antar umat agama lain dimana, kita harus saling menghormati, menjaga dan mengamankan jika ada prosesi ibadah umat agama lain untuk meningkatkan kebersamaan dan toleransi antar umat agama.

Selama ini pemerintah telah memberikan kebijakan kebijakan yang menjunjung tinggi kerukunan dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di Nusa Tenggara Barat, kebijakan yang dibuat pemerintah adalah lewat SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. SKB tersebut oleh Kanwil Depag Nusa Tenggara Barat yang selalu di sosialisasikan di tengah masyarakat. Dari SKB tersebut sudah jelas usaha pembangunan kerukunan yang terkandung di dalamnya. Aturan main tentang penyebaran agama, pembangunan tempat ibadah, perkawinan beda agama, pemakaman jenazah, hingga pemakaian dana keagamaan yang bersumber dari bantuan luar negeri diatur didalamnya. Namun kebijakan yang dibuat pemerintah itu belum dapat diataati oleh semua pemeluk agama karena masih bersifat normatif dengan muatan hukum positif.

Kesimpulan

Pendekatan kearifan lokal sangat tepat dalam menyelesaikan konflik karena selama ini di samping sudah membudaya dalam masyarakat, kearifan lokal juga masih memiliki nilai sakral dan tidak hanya berorientasi profan semata. Dengan adat lokasi ini, diharapkan revolusi konflik bisa selesai dan diterima secara damai oleh semua kelompok dalam waktu lama.

Daftar Pustaka

- Atmayanti, T. (2022). Analisis Ekonomi Sektoral Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2020: Tinjauan Shift Share Analysis. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 6(1), 157-170.
- Muhlisin, M., & Sudewi, N. K. P. N. (2023). Cultural shifts in Lombok: During and after the COVID-19 pandemic. *Rainbow: Journal of Literature, Linguistics and Culture Studies*, 12(2), 134-140.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Hilman Hadikusuma, 2003 Hukum Waris adat , Bandung; Citra Aditya Bakti.
- , Hukum perjanjian adat, Bandung ;Alumni,. 1979.
- , Bahasa Hukum IndonesiaBandung;Alumni,2013.

- Hans Kelesen , *Essays In Legal And Moral Philosophy*, Alih Bahasa, Arif Sidharta,Bandung ;Alumni,2006.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Imam Sudiyat,*Hukum Adat Seketsa Asas*, Jakarta ; Liberty, 2012
- HMA, Kuffal, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Hakim : Antara Gaji, Keadilan, Kejujuran dan Ketaqwaan, Malang, UMM Press, 2012.
- John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terj. Uzair Fauzan & Heru rasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipler*, Yogyakarta; Paradigma, 2010.
- Lawrence Meir Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*. New York: W.W.Norton & Company,1984.
- Otje Salman, *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris* , Edisi pertama Bandung, Alumni, tahun 1993
- Pasek Swastika , *Suputra dan bhakti kepada leluhur*, (Denpasar;Kayumas Agung,2007)
- Paul Scholten, *De Struutur Der Rehtswetenschap*,alih bahasa Arif Sidharta, Yogyakarta ; Pustaka pelajar,2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Thn 2006.
- Pudja Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Ke Dalam Hukum Adat Bali Dan Lombok*. cv Yunasco, 1977.
- Pudja Gde Dan Tjokordan Rai Sudhartha , *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra) Atau Weda Smerti Compedium Hukum Hindu*, Surabaya ; Paramitha 2004.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* , Jakarta ; Ghalia Indonesia Thn 1988.
- R Subekti , *Kitab Undang -undang Hukum Perdata* , Jakarta ;Pradnya paramitha1990
- Atmayanti, T. (2022). Analisis Ekonomi Sektoral Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2020: Tinjauan Shift Share Analysis. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 6(1), 157-170.
- Muhlisin, M., & Sudewi, N. K. P. N. (2023). Cultural shifts in Lombok: During and after the COVID-19 pandemic. *Rainbow: Journal of Literature, Linguistics and Culture Studies*, 12(2), 134-140.
- Atmayanti, T. (2022). Analisis Ekonomi Sektoral Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2020: Tinjauan Shift Share Analysis. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 6(1), 157-170.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Thn 1985.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*,Jakarta; PT RajaGrafindo Persada 1981. Soerjono ,Soekanto, , *Biliografi hukum adat Indonesia (Akhir abad XIX)*, Bandung;Alumni, 1973.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta ; Universitas Indonesia (UI-Press) 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo , *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta Thn 1988.

- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta; Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Serojo Wignjodipoero, Pengantar Dan Azas Azas Hukum Adat, Jakarta; Gunung Agung, 1995.
- Sudikno metrokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta; universitas Atmajaya, 2010.
- , Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta; Liberty, 2003.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta; PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia pada akhir abad ke 20. Alumni Bandung Thn 2006.
- Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan., Bandung Afabeta, 2008.
- Tim penyusun, Ketetapan-ketetapan MPR RI dan GBHN 1999-2004 dilengkapi amandemen UUD 1945, Tamira Utama, Jakarta, 2004.
- Tim penyusun, Departemen Pendidikan nasional, kamus besar bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta, Thn 2000.
- Tim penyusun, Kompilasi Dokumen Literer 45 Tahun Parisada. Parisada Hindu Dharma Pusat Thn 2005.
- Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng Soebakti Poesponoto, (Jakarta; Pradnya paramitha 2001),
- Lili Rasjidi & Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum, Bandung Citra Adhitya Bahkti, 2007.
- Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto, Eksistensi dan dinamika perkembangan hukum adat waris Bali dalam Putusan Pengadilan. Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2017
- Meuwissen, Tentang pengembangan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Penerjemah B. Arif Sidhartha, Bandung; Rifka Aditama, 2007.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, Dualisme, Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta pustaka pelajar, 2013
- Wayan P Windia..at el, Pewarisan perempuan menurut Hukum Adat Bali, Denpasar; Udayana university Press, 2012.
- , Menjawab masalah Hukum, Denpasar; BP, 1995
- Wirawan dan Artadi. Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Keterampilan Non Litigasi Aparat Hukum Udayana university Press. Denpasar. 2017
- V.E Korn. Hukum Adat Di Bali (Net Recht Van Bali. Udayana Universty Press, Denpasar, 2017.
- Zainudddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta; Sinar Grafika, 2017.
- , Pelaksanaan hukum waris di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2008